DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat 164

Apriadi, Aap. 2010. *Pengaruh kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten*. Artikel Penelitian. Klaten

Anjarwati, M. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. AAJ 1 (2) (2012*). Universitas Semarang: Semarang.

Anggraini, Yunita dan Puranta, Hendra, 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*: *Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yoyakarta. UPP STIM YKPN.

Bahri, Syambudi Prasetia. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon)*. Universitas Pasundan. Bandung.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.

Ehrmann Suhartono Dan Mochammad Solichin. 2006. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23-26

HS Ginting. 2010. *Pengaruh Patisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Indrianti Yulia Friska1. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating* (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi).

Kenis, I. 2011. *Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes, and Performance.* Accounting Review, October, hal. 707- 721.

Komang Sri Endrayani, I Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). Volume 2.

Kumorotomo,Wahyudi. 2010. *Akuntabilitas Birokrasi Publik* :*Sketsa pada masa transisi.*Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Kurniawan. 2009. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan*. Skripsi dipublikasikan. Bandung:UPI

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah.* Jakarta: Penerbit Erlangga

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2 : 1. (1-17).

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Andi

Netty Herawati, 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. ISSN: 0852-8349.

Nur Laila Yuliani, Barkah Susanto. 2014. *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik*. ISSN 2460-0784.

Sancoko, Bambang. 2008. *Kajian Artikel-Artikel Warta Pengawasan Vol XXII/ Edisi HUT Ke-32 BPKP 9 hadap Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI

Seri Suriani. 2015. *The Effect of Performance-Based Budgeting Implementation towards the Institution Performance Accountability (Case Study: Wajo)*. ISSN 2220–3796.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV.Alfabeta.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: GENESIS.

Umi Narimawati. 2010. *Meteodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung:Agung Media.

Umi Narimawati. 2011. *Meteodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung*: Agung Media.

Ummu Kaltsum, Abdul Rohman. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga)* Universitas Diponegoro ISSN 2337:3806.

Perundang-undangan

Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman*

Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

_____ , Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.